



DISKUSI PANEL

DALAM RANGKA HARI PEKABARAN INJIL DI PAPUA

1 FEBRUARI 2003

GEREJA DAN PEMBANGUNAN
DARI PERSPEKTIF
SOSIO-POLITIK PAPUA TANAH DAMAI

oleh

THEO VAN DEN BROEK OFM

**SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA**

JAYAPURA

FEBRUARI 2003



Sekretariat Keadilan dan Perdamaian / Office for Justice and Peace

**KEUSKUPAN JAYAPURA
KOTAK POS 1379
JAYAPURA 99013
PAPUA, INDONESIA**

**DIOCESE OF JAYAPURA
Tel: +62 – 967 – 534993
Fax: +62 – 967 – 534993
E-mail sekkp@jayapura.wasantara.net.id**

GEREJA DAN PEMBANGUNAN DARI PERSPEKTIF SOSIO-POLITIK PAPUA TANAH DAMAI

Suatu penilaian yang menantang

Dalam kerangka acuan Panel Diskusi ini panitia mengingatkan kembali akan pernyataan Bapak Drs. August Kafiari M.A. “bahwa pembangunan Papua dimulai dari Mansinam dan 5 Februari itu menjadi tonggak sejarah penting bagi peradaban dan pembangunan masyarakat di daerah ini”.¹ Membaca pendapat itu kami teringat akan apa yang ditulis oleh Bp. Pdt. Dr. Benny Giay dalam kata pengantar pada terbitan edisi terjemahan suatu buku yang ditulis oleh seorang utusan Injil, Frans van Hasselt, pada tahun 1926, yang berjudul: “Di Tanah Orang Papua”. Bapak Benny menyatakan: “buku ini perlu dibaca secara kritis. ... karena ia ditulis seorang penyiar Injil Barat abad lalu, yang berpotensi menggunakan Injil untuk mendorong dan membuka pintu bagi masyarakat untuk mewujudkan visi masyarakat yang dikehendakinya. Atau menghancurkan dan menjadi obyek yang pasif dan menjadi bahan sosialisasi paham-paham tentang Injil yang menghancurkan rakyatnya sendiri. Seperti yang terungkap lewat pernyataan seorang mahasiswa beberapa waktu lalu bahwa perayaan 5 Februari (masuknya Injil versi GKI di tanah Papua) dan 6 April (berdirinya Gereja Kingmi Papua) seharusnya diperingati sebagai hari dimana kehancuran jati diri bangsa Papua dimulai secara sistematis...”²

Melalui dua penilaian yang sangat berbeda tadi kita semua diingatkan pada kenyataan bahwa sejarah kita dapat ditafsirkan secara berbeda, maka berbeda pula harapannya atau gambarannya mengenai masa depan Tanah Papua. Kedua kutipan diatas dapat membantu kita untuk menyadari – sejauh kita belum sadar - bahwa suasana kemasyarakatan di Papua dewasa ini sangat diwarnai oleh suatu perbedaan pendapat, perbedaan penilaian

¹ Lihat “Kerangka acuan diskusi panel dalam rangka hari Pekabaran Injil di Papua dan pertemuan pimpinan gereja dan perguruan tinggi kristen se Indonesia Timur”, hlm. 1.

² “Di Tanah Orang Papua”, oleh F.J.F. van Hasselt, Utrecht 2002, hlm. vii-viii (buku ini adalah terjemahan dari buku yang berjudul “In Het Land Van De Papoeas”, F.J.F. van Hasselt, Utrecht 1926.

menyangkut pengalaman-pengalaman di masa yang lampau, maka dengan sendirinya juga menghasilkan perbedaan konsep akan masa depan Papua, dan mengenai jalan yang tepat untuk menuju ke situ. Perbedaan demikian dapat mengganggu ketenangan kita, malahan dapat menjadi suatu sumber konflik yang serius. Tambah lagi sejumlah sumber keresahan lain seperti diuraikan Mgr. Leo Laba Ladjar ofm sewaktu Konferensi Perdamaian³, dimana beliau menyebutkan enam medan konflik yang aktual di Papua ini. Beliau menyebutkan: [1] perbedaan aspirasi politik – kubu O(tonomi) dan kubu M(erdeka); [2] penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan; [3] pemerintahan yang semu; [4] kecurigaan antar kelompok etnis dan suku; [5] kecurigaan antar kelompok agama; dan [6] kesenjangan sosial ekonomi. Kami masih ingin menambah dua unsur lain lagi, yakni: [7] kehilangan pegangan hidup bersama, dan [8] pengurusan sumber daya alam.

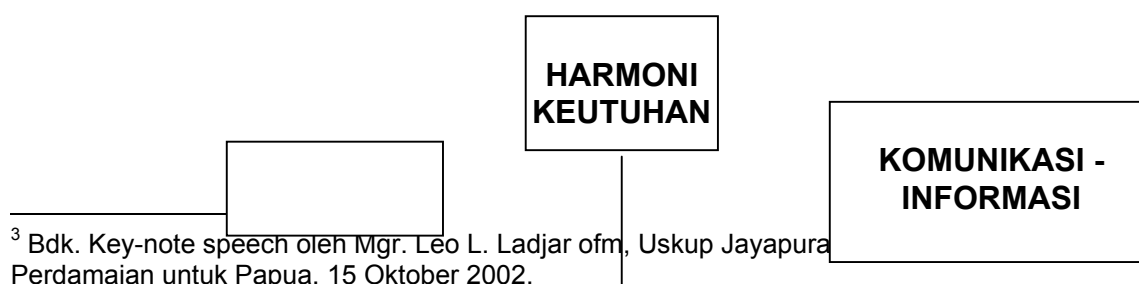
Allah memilih tinggal diantara kita

Menghadapi kenyataan sosio-politik yang begitu menantang, jalan mana yang terbuka untuk menjamin supaya “rumah besar kita” di Papua adalah “tempat yang bersahabat” dengan manusia sehingga martabatnya diakui, diindahkan sepenuhnya dan diberikan peluang untuk menikmati pengembangan diri sepenuhnya?, atau dengan kata lain: supaya Kerajaan Allah terwujud hari ini dan di tempat ini dalam kehidupan kita hari ini dan di tempat tercinta ini? Bagaimana menyempurnakan tempat tinggal kita hingga makin hari makin menjadi tempat dimana Allah telah memilih untuk tinggal diantara kita?

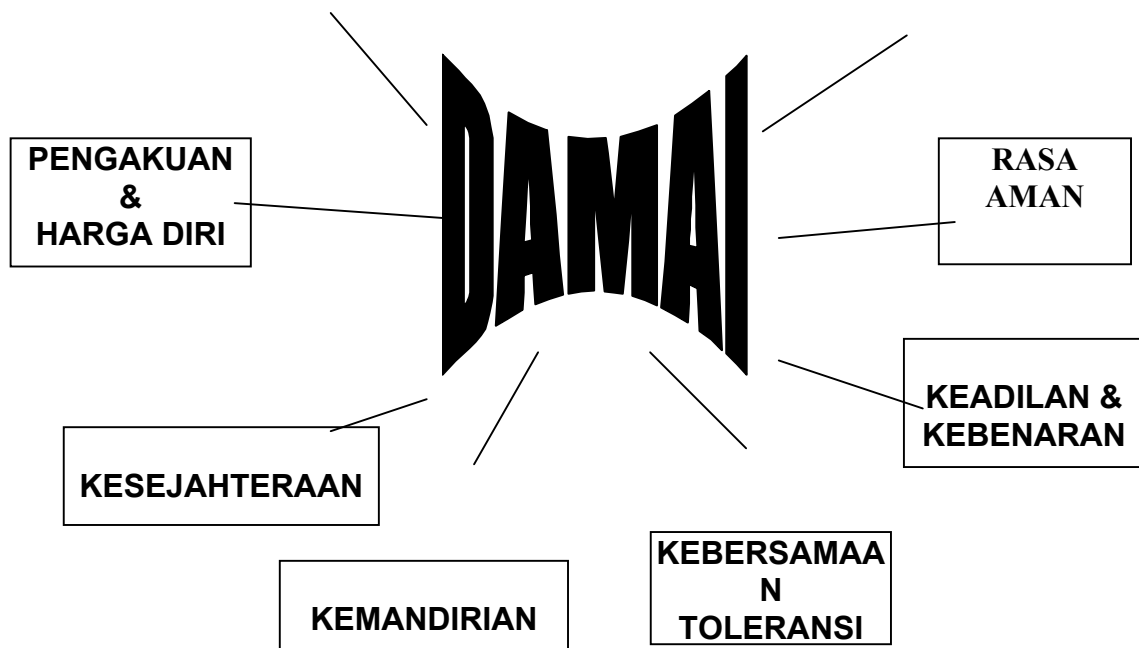
Pada dasarnya suatu perbedaan penilaian atau pendapat tidak perlu meresahkan kita, karena wajar saja dan merupakan ungkapan kebebasan manusia serta kebenaran yang terus kita gali dan temukan. Namun benar juga perbedaan yang disinyalir diatas dapat menjadi suatu malapetaka kalau kita tidak aktif menanggapi dan mengelolanya dalam kepercayaan bahwa akhirnya kita semua dipanggil untuk hidup dalam damai dan menjadi sarana penyelamatan satu bagi yang lain. Itulah inti misi gereja dan setiap anggota umatnya dan inti misi lembaga keagamaan manapun di Papua ini.

Membangun budaya damai

Bergumul dengan misi yang disebutkan di atas kami ingin menyajikan suatu uraian singkat mengenai apa artinya “DAMAI” sebagai hasil upaya kehidupan kita bersama. Dibawah ini kami mencatat sejumlah komponen yang menentukan ada-tidaknya “rasa damai”.



³ Bdk. Key-note speech oleh Mgr. Leo L. Ladjar ofm, Uskup Jayapura Perdamaian untuk Papua, 15 Oktober 2002.



Keterangan singkat:

Kalau kita berpikir mengenai “DAMAI”, sejumlah hal yang kita ingin supaya terlaksana dan dapat dihayati bersama adalah: kita ingin supaya hidup kita aman, supaya kita dihargai dalam kepribadian kita masing-masing walau berbeda, kita ingin supaya ada makanan/kesejahteraan, kita ingin supaya diberlakukan adil dan sesuai kebenaran, kita mau diakui sebagai pribadi orang, sebagai suku, kita tidak mau hidup dalam ketergantungan saja dan kita mau atur diri, kita mau supaya suara kita terdengar dan diberikan tempat, dan akhirnya kita mau supaya hidup kita bersama segala isi alam semesta menjadi harmonis, bernafas kesatuan dan keutuhan.

Kata-kata tadi semua merupakan kata yang sangat bernilai, dan yang dapat menjadi pegangan dalam perumusan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan kita dalam usaha “Membangun Budaya Damai”. Memang setiap “kata kunci” memiliki muatan “politik praktis”, berarti: menuntut suatu kelakuan yang sesuai.

Peranan Gereja dan/atau orang yang beriman

Tidak mudah untuk menterjemahkan komponen-komponen tadi dalam suatu ‘kerangka perilaku’ kita sebagai lembaga keagamaan, dan/atau sebagai pribadi orang yang beriman. “Damai” sebagai hasil cara hidup kita memang sangat kompleks dan berkaitan dengan begitu banyak bidang. Secara umum dapat dikatakan bahwa Gereja sebagai lembaga diharapkan untuk terus-menerus membantu para anggota untuk menghayati nilai-nilai injili yang

begitu dasariah dalam kehidupan sehari-hari (*tugas pewartaan*), dan diharapkan menjadi suatu penuntun bagi siapa saja yang berkehendak baik entah bagaimana kedudukan atau keyakinannya (*tugas kenabian*). Sedangkan dari semua pribadi orang yang beriman dapat diharapkan bahwa penghayatan nilai-nilai injili menjadi sumber perilakunya sendiri dan sumber yang menggerakkan dalam menunaikan tugasnya ditengah-tengah masyarakat; maka diharapkan supaya setiap orang menjadi pewarta dan nabi di tempatnya sendiri, dalam suasana keluarga, di tempat kerja, dalam usaha mencari nafkah, dalam sikap politik dst.

Sambil memperhatikan unsur-unsur komponen “Damai” dengan bebas kami mencatat sejumlah gagasan perhatian yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam mengukur pelaksanaan misi kita sebagai gereja maupun sebagai pribadi orang beriman.

1. Mengambil bagian aktif dalam mempromosikan cita-cita kita, yakni: “Papua Tanah Damai” (melalui kotbah, wawancara, dialog interaktif, penentuan kebijakan di DPR, partai politik, media massa).
2. Memberikan arah dan memurnikan motivasi (kebenaran, transparansi, keadilan, kesetiakawanan) pada lembaga perwakilan rakyat (DPR, MRP, LMA dan sejenisnya).
3. Mendorong secara aktif berfungsinya badan-badan yang mengawasi kebijakan pemerintah atau kebijakan instansi-instansi lain yang berkuasa (termasuk aparat keamanan) a.l. dengan memperhatikan isi tata kerja pemerintah sebagaimana terungkap dalam beberapa pasal UU No. 21/2001 (Otsus).
4. Membenahi para aktor di tingkat media massa supaya menciptakan sikap profesionalnya yang mengutamakan komunikasi/informasi yang benar sambil menghilangkan sikap “memperbudakkan diri” pada uang atau penguasa.
5. Mengembangkan media komunikasi yang membangun nilai-nilai – kebenaran, transparansi, keadilan, pengampunan, kesetiakawanan, kebersamaan, religiositas – melalui misalnya rubrik keagamaan di RRI, TVRI, dan harian/mingguan lokal.
6. Membela secara aktif siapa saja yang menjadi korban penindasan atau yang tidak diperlakukan secara adil melalui seruan adanya suatu investigasi yang benar dan obyektif; menghilangkan gaya saling tuduh-menuduh; menuntut penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang dengan menghilangkan kebiasaan ‘kekebalan hukum’ bagi kelompok-kelompok tertentu.
7. Mendorong pengakuan antara kesetaraan laki-laki dan perempuan, mulai dari kalangan gereja sendiri, dan juga keluarga.

8. Menciptakan iklim dialog antara pihak yang berkonflik (antar pihak penindas dengan korban penindasan, termasuk dialog politik demi pelurusan sejarah), antar suku (dialog lintas etnis), antar agama (dialog lintas agama).
9. Mengawasi terbentuknya kelompok-kelompok yang berniat untuk memecah-belahkan masyarakat hingga munculnya kekerasan antar saudara (termasuk kelompok-kelompok para-militer, kelompok ekstrem keagamaan, dan kelompok lainnya yang mengandalkan kekerasan demi mencapai tujuan mereka).
10. Memperhatikan secara khusus peluang pengembangan diri bagi kelompok-kelompok yang lemah, termasuk kelompok-kelompok minoritas dan kelompok tani serta buruh.
11. Mengandalkan sarana pendidikan yang dipegang oleh gereja-gereja supaya menjadi sarana pembekalan nilai-nilai hidup bagi para murid/siswa/mahasiswa/I (peranan Yayasan, guru, dosen).
12. Mendorong secara aktif segala aksi untuk memberantaskan penyakit yang mematikan, yakni HIV / AIDS, termasuk juga upaya untuk mengendalikan “pemasaran seks” dalam segala bentuknya.
13. Mendesak Pemerintah Daerah (dan instansi yang terkait) untuk mengubah sikap dalam mempromosikan Otsus yang selama ini hanya terfokus pada ‘tersedianya banyak uang’ dan peningkatan mental proyek, diubah menjadi promosi yang terfokus pada harga diri serta kemandirian para warga. Hal ini makin mendesak mengingat gaya penerapan Otsus serta hasilnya selama tahun 2002.
14. Mengembangkan penghayatan religius yang berakar dalam religiositas asli bangsa Papua (inkulturasi, penggalian nilai tradisi yang bermuatan religius) sehingga bangsa Papua sungguh-sungguh menjadi pemilik gereja dan bukan sebaliknya.
15. Mempromosikan “Piagam Hak-Hak Asasi Mansia se-Dunia” sebagai “Adat Baru” dunia modern kita; sebagai pengangan dasar dalam kehidupan bersama yang sangat berdekatan dengan nilai-nilai Injil.
16. Menjaga keutuhan lingkungan, semesta alam dengan segala isinya, karena semuanya ini dipercayakan kepada manusia untuk jaga sehingga menjadi pujian bagi Penciptanya.

Penutup

Demikianlah beberapa pikiran yang dapat kami sampaikan dan kami berterima kasih kepada Panitia atas undangan untuk memberikan sumbangan pikiran kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Bahan ini kami sampaikan sebagai bahan refleksi yang kami harapkan dapat membantu kita

bersama untuk menjadi “Saksi Hidup Cintakasih dan Kebenaran” ditengah-tengah masyarakat yang serba bingung. Semoga!

Theo van den Broek ofm
Direktur SKP Jayapura